

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

SKRIPSI

OLEH :

ILHAM

105710214615



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

SKRIPSI

**ILHAM
105710214615**

*Di ajukan untuk Memenuhi salah satu syarat Penelitian pada Program
Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng ini ku persembahkan kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda “**Lancong** dan Ibunda **Nadira**” yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta dukungannya untuk semangat menyelesaikan skripsi ini. Juga untuk saudara serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungannya.



Ikhlaslah seperti gula yang larut tak terlihat tapi sangat bermakna



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
Nama Mahasiswa : Ilham
NIM : 105710214615
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Senin 30 September 2019 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 September 2019

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Ikram Idrus, M.S
NIDN : 0026125901

Pembimbing II,

Idra Wahyuni, S.Pd., M.Si
NIDN : 0917128701

Mengetahui



Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Imbaj R. Suford, SE., MM
NEM : 903978

Ketua Program Studi,

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM : 710551



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Ilham**, NIM **105710214615**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar NOMOR: 0007/SK-Y/60201/091004/2019 M, tanggal 30 Muharram 1441 H/30 September 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Muharram 1441 H
30 September 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman SE, MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM
2. Dr. Muhammad Ikram Idrus, MS
3. Dr. Edi Jusriadi, SE.,MM
4. Nasrullah, SE.,MM

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM. 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat :Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham

Nim : 105710214615

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan Judul : Analsis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi ini saya ajukan di depan Tim Penguji adalah **ASLI** hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Ilham

Diketahui Oleh:



Dekan

Email Rasulong, SE.,MM
NBM: 903078

Ketua Program Studi,

Hj. Naidah, SE.,MM
NBM : 710551

ABSTRAK

ILHAM 2019, *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng*. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh bapak H. Muhammad Ikram Idrus dan ibu Idra wahyuni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Soppeng. Penggunaan data dalam menganalisis adalah anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan; anggaran belanja dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis varian (selisih) anggaran pendapatan dan belanja, pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah, derajat desentralisasi, kemandirian daerah, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 sampai 2018 dalam merealisasikan pertumbuhan pendapatan yang positif. pada tahun 2014 sampai 2018 Pemerintah Kabupaten Soppeng masih bergantung kepada pemerintah pusat sehingga penyelenggara desentralisasi masih rendah. Dalam merealisasikan anggaran belanja dapat dikatakan efisien dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan positif yang diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan.

Kata kunci : Pendapatan daerah

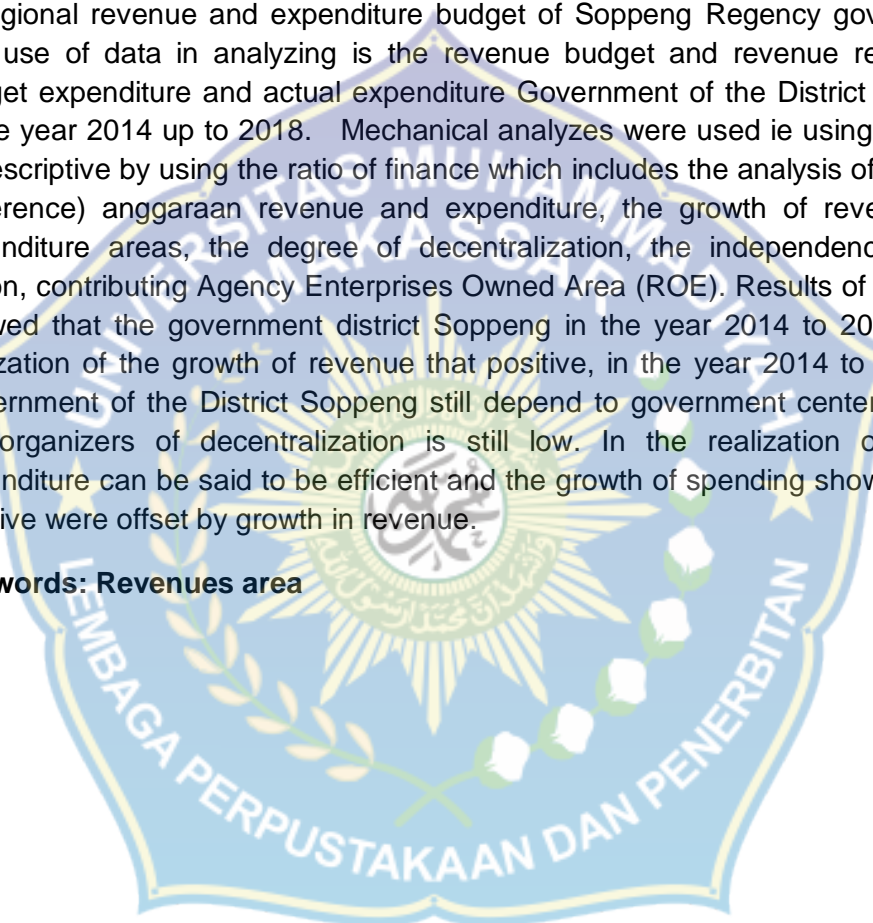


ABSTRACT

ILHAM 2019, *Analysis of Performance Management of Budget Revenue and Expenditure Regional the Government of the District Soppeng*. Thesis of Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Mr. H. Muhammad Ikram Idrus and Mrs. Idra Wahyuni.

This study aims to determine the level of performance of the management of regional revenue and expenditure budget of Soppeng Regency government. The use of data in analyzing is the revenue budget and revenue realization; budget expenditure and actual expenditure Government of the District Soppeng in the year 2014 up to 2018. Mechanical analyzes were used ie using methods of descriptive by using the ratio of finance which includes the analysis of variance (difference) anggaran revenue and expenditure, the growth of revenue and expenditure areas, the degree of decentralization, the independence of the region, contributing Agency Enterprises Owned Area (ROE). Results of the study showed that the government district Soppeng in the year 2014 to 2018 in the realization of the growth of revenue that positive, in the year 2014 to 2018 the Government of the District Soppeng still depend to government centers so that the organizers of decentralization is still low. In the realization of budget expenditure can be said to be efficient and the growth of spending shows growth positive were offset by growth in revenue.

Keywords: Revenues area



KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah tiada henti diberikan kepada hambah-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta parakeluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng**”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak **Lancong**, Ibu **Nadira**, saudara Muhammad Tahir, S.P. Saudara Mustafa, S.S, dan saudari Mariama yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah di berikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. H. Muh. Ikram Idrus, M.Si. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Idra Wahyuni, S.Pd., M.Si. Selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Skripsi hingga ujian Skripsi.
6. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak pernah lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Sahabat dan teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorong anda dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih kepada semua kerabat yang tidak persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampung penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis sangat mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah–mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 3 September 2019



ILHAM

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	5
C. TujuanPenelitian	5
D. ManfaatPenelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Keuangan Daerah	6
B. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	8
C. Tinjauan Empiris	23
D. Kerangka Konsep.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29

A. Jenis Pelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Tenik Pengumpulan Data	30
E. Definisi Operasional Variabel	30
F. Teknis Analisis	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Gambaran Perekonomian dan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng.....	37
C. Hasil Perhitungan dan Aanalisis Kinerja Pengelolaan APBD	43
D. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTKA.....	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD.....	9
2.	Proses Penyusunan APBD.....	13
3.	Kerangka Konsep.....	28



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Penelitian Terdahulu	24
2.	Defenisi Operasional Variabel	30
3.	Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi	33
4.	Kategori Nilai Kinerja	33
5.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persentase), 2014-2018	38
6.	Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018	43
7.	Perhitungan Varians Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018	44
8.	Perhitungan Pendapataan Tahun 2014-2018	45
9.	Derajat Desentralisasi Tahun 2014-2018	46
10.	Kemandirian Keuangan Tahun 2014-2018	47
11.	Derajat Kontribusi BBUMD Tahun 2014-2018	48
12.	Perhitungan Varians Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018	50
13.	Pertumbuhan Belanja Tahun 2014-2018	51
14.	Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Tahun 2014	52
15.	Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2015-2017	52
16.	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2018	53
17.	Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2014-2018	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas, membutuhkan suatu sistem pemerintahan (*governance*) yang baik. Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah. Kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam kordinator kepentingan-kepentingan nasional.

Untuk tujuan itu banyak yang harus kita lakukan, salah satunya adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab fiskal, politik dan administrasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan tanggungjawab fiskal merupakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, atau dalam arti yang lebih sempit sering juga disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efesiensi, dan efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan saran pemeritah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapain tingkat kinerja tertentu artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelastentang tuntutan besarnya pembiayaan atas

berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang bertujuan pada kepentingan publik (PP Nomor 58 Tahun 2005).

Setelah diberlakukan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang dana Perimbangan
2. Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman daerah.
4. Kepemendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD.

Selain itu dikeluarkan juga UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dari undang-undang tersebut diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah. Maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar pada system pemerintah yang

ada. Salah satunya perubahan mendasar yang dimaksud adalah penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah (Mardiasmo, 2000).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, kinerja pemerintah daerah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintah di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran (APBD) berdasarkan kinerja (Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah) ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang baik, transparan dan tepat sasaran.

Soppeng sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan memiliki banyak potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Kabupaten Soppeng memiliki banyak sektor yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Tempat wisata. "Demi meningkatkan potensi pendapatan daerah dari berbagai sektor pendapatan yang menjadi tumpuan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Soppeng sebagian besarnya ada pada pajak bumi dan bangunan (PBB), kepala bidang pendapatan pajak badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Soppeng Juniar ST MM menjelaskan

bahwa hampir semua pendapatan dari sektor pajak mengalami kenaikan termasuk pajak restoran yang meningkat sekitar 25 persen, target Rp.200 juta dan realisasi per tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 655.651.892 ini menjadi salah satu indikator bahwa perekonomian masyarakat Soppeng sedang tumbuh dan berkembang dengan baik walaupun masih ada potensi yang belum maksimal seperti pariwisata, retribusi-retribusi dan sektor lain belum dikelola dengan baik (Soppeng, Mediata News Agus PH Rauf)".

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lejja, belum mencapai target hingga November 2018. Kabid pengembangan SDM dan Pariwisata Soppeng Nelly Mengatakan, target PAD Lejja sebanyak Rp. 1,1 M. Namun pendapatan hingga Bulan November baru mencapai Rp.872.549.000. Sementara target Ompo sebesar Rp. 500 juta, dan pendapatan hingga November baru Rp. 264 juta lebih. Sementara pendapatan Citta sudah melebihi target. Target PAD citta hanya Rp. 30 juta. Pemasukan saat ini sudah ada Rp.58 juta". Namun pada kenyataannya sumber penerimaan/pendapatan terbesar Kabupaten Soppeng adalah Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan PAD-nya masih kecil dikarenakan tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Soppeng tergolong pola hubungan instruktif yaitu rata-rata 3,69 persen yang berarti bahwa sebesar 96,31 persen masih bergantung pada pemerintah pusat (Tribun Soppeng 20 Desember 2018 Sudirman)".

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat satu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Soppeng selama periode 2014-2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Soppeng selama periode 2014-2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Bagi pemerintahan, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah

1. Pengertian Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Nataludin (2001) keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Menurut Halim (2004:18), keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

Menurut Halim (2004:20), "Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)".

2. Pengelolaan Keuangan

Dalam ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, "Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah". Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2010 menyatakan bahwa "APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut : (a) partisipasi masyarakat, (b) pola pembangunan berkelanjutan, (c) pengarusutamaan gender, (d) tata pengelolaan yang baik, (e) pengurangan kesenjangan antarwilayah, (f) percepatan pembangunan daerah tertinggal, (g) desentralisasi dan otonomi daerah, serta (h) padat karya. Dengan adanya reformasi keuangan daerah terjadi perubahan mendasar pengelolaan keuangan daerah/anggaran daerah (APBD) yaitu perubahan dari *Traditional Budgeting* ke *Performace Budgeting*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yuwono dkk, (2005:63-64).

Aspek utama *Budgeting Reform* adalah perubahan dari *Traditional Budgeting* ke *Performance Budgeting*. *Traditional Budgeting* didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *Line=Item* dan *Incremental*, proses penyusunan anggaran hanya didasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. *Performance Budgeting* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mendefinisikan "APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Rencana keuangan ini meliputi pendapatan dan pembiayaan.

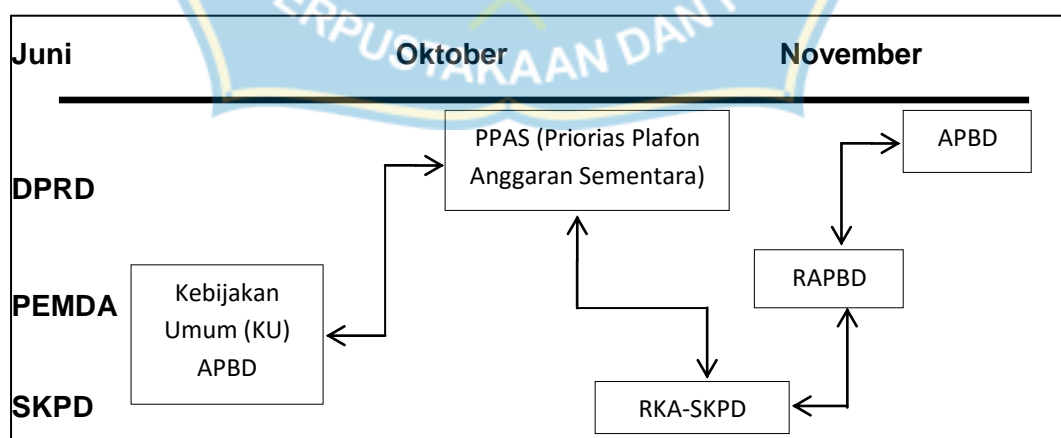
Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun tertentu". Jadi dapat disimpulkan APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD menyajikan informasi rencana keuangan pemerintah daerah dalam satu periode tertentu. Sedangkan menurut Bastian (2006:189), APBD merupakan rencana kerja pemma

dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”. Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 APBD mempunyai fungsi yaitu : (a) fungsi otorisasi, (b) fungsi perencanaan, (c) fungsi pengawasan, (d) fungsi alokasi, (d) fungsi distribusi, (e) fungsi stabilisasi.

2. Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan, kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi ini lah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006 :188).

Menurut Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003, skema alur proses dan jadwal penyusunan APBD adalah sebagai berikut:



Sumber : Undang-undang Nomor 17 tahun 2003

Gambar 1. Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD

Dari gambar 1 dapat dilihat proses penyusunan APBD dimulai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun Anggaran berikutnya. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD, strategi dan plafon sementara yang telah ditetapkan pemerintah dan DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang dicapai. Rencana dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang itu tidak mengatur proses penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD. UU Nomor Tahun 17 Tahun 2003 menentukan bahwa

ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

Setelah dokumen Rencana Perda mengenai APBD tersusun, Pemerintah Daerah mengajukan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Berdasarkan Pasal 186 UU Nomor 32 Tahun 2004, rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

3. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun menyusun rancangan kebijakan umum APBD, kebijakan umum APBD yang disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan pendanaannya serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (Satu) tahun.

Formulasi kebijakan anggaran harus memuat kejelasan mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai ditahun mendatang dan sekaligus juga, harus menjadi acuan bagi proses pertanggung jawaban kinerja keuangan daerah pada akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) sedangkan pada pelaksanaan operasional bersifat teknis, proses ini diserahkan pada pemerintah daerah.

Penyusunan kebijakan Umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiscal, sementara perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya yang tersedia pada pemerintah.

Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun KUA yang membuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang dispakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam KUA selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

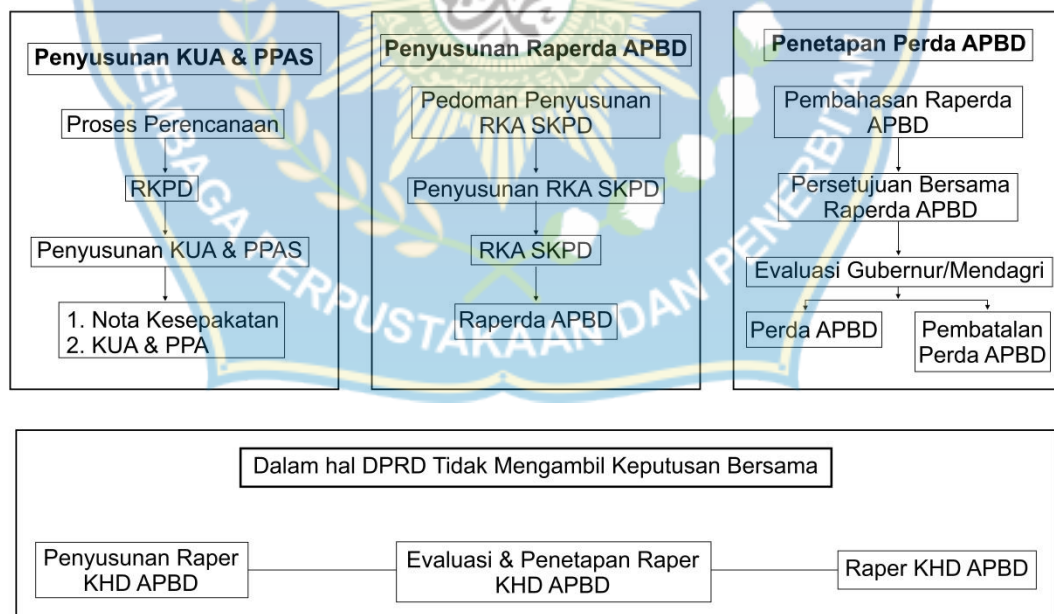
Penyusunan KUA merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka strategis daerah (Renstra). Sementara, tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran yang dasarnya merupakan tahapan

dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang ditetapkan dalam rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

Mekanisme Penyusunan Kebijakan umum APBD termuat dalam PP Nomor 58 tahun 2005 pasal 34 memiliki mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD.
- b. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tersebut berpadoman pada penyusunan APBD yang ditetapkan oleh menteri dalam Negeri setiap tahun.
- c. Kemudian Kepala Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya tersebut sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan juni tahun anggaran berjalan.

Sementara itu, proses penyusunan APBD berdasarkan Nomor 13 Tahun dapat dilihat pada gambar tersebut:



Sumber :Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

Gambar 2. Proses Penyusunan APBD (Permendagri 59 Tahun 2007)

4. Klarifikasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Adapun struktur APBD berdasarkan Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tiga bagian yaitu pendapatan daerah, Belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah yang membiayai kegiatan rutin dan pembangunan di samping penerimaan lain berupa hasil pajak atau bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta pinjaman (Priyo Hari Adi, 2006). Sedangkan penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 dan Permendagri nomor 35 tahun 2002 tentang pajak daerah dan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana yang dirinci menurut obyek pendapatan adalah sebagai berikut :

- (a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- (b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN,
- (c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirinci menurut objek pendapatan adalah sebagai berikut:

- (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (b) Jasa giro.
- (c) Pendapatan bunga.
- (d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- (e) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

- (f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - (g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - (h) Pendapatan denda pajak.
 - (i) Pendapatan denda restribusi.
 - (j) Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan.
 - (k) Pendapatan dari pengembalian.
 - (l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
 - (m) Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
 - (n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
- 2) Dana Perimbangan
- Dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
- a. Dana Bagi hasil
 - 1) Bagi hasil pajak.
 - 2) Bagi hasil bukan pajak.
 - b. Dana Alokasi Umum, dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yaitu terdiri dari :
- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, bada/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
 - b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan bencana alam.

- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah lainnya.

4) Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai pengurangan kekayaan bersih. Belanja daerah yang dipergunakan dalam dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penganannya dalam bagian tertentu atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah termasuk dalam pengeluaran daerah.

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari :

1) Belanja pegawai

Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang di berikan kepada pegawai negeri sipil, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala daerah beserta wakilnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Bunga

Pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

3) Subsidi

Bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

4) Hibah

Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah daerah.

5) Belanja bagi hasil

Dana yang bagi hasil bersumber dari pendapatan Provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6) Bantuan keuangan

Bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

7) Belanja tidak terduga

Untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam.

b. Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :

1) Belanja pegawai

Belanja untuk pengeluaran honorium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

2) Belanja barang dan jasa

Pengeluaran pembelian atau pengadaan barang atau pemakaian jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja modal

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, mesin, gedung, dan sebagainya.

c. Pembiayaan

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan terdiri dari :

1. Penerimaan Daerah

a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai di akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, dan semua pelampauan atas pemerintah daerah.

b) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dana alokasi umum, pinjam daerah atau penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan perundang-undangan.

c) Penerimaan pinjaman daerah berasal dari kegiatan meminjam dana termasuk menerbitkan obligasi.

d) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Berasal dari diterimanya kembali sejumlah pinjaman yang telah diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.

e) Penerimaan piutang daerah

Penerimaan piutang daerah berasal dari pelunasan piutang pihak ketiga seperti penerima piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank atau bukan bank, serta penerimaan piutang lainnya.

f) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari penjualan perumahan milik daerah, dan penjualan aset milik

pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

2. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

a) Pembentukan dana cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang mengeluarkan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana yang dialokasikan sebagai dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dan cadangan.

b) Penyertaan modal (Investasi Pemerintah Daerah)

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa kegiatan penyertaan modal (investasi).

c) Pembayaran pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihutang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

d) Pemberian pinjaman Daerah

Akun pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat atau pusat lainnya.

5. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Bastian (2006: 274), Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi, dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak. menyimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Menurut Mahmudi (2007) Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dalam dua bagian yaitu :

a. Analisis kinerja pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya, apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerjanya dapat dilihat dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat komponen pendapatan yang lebih berpengaruh.

1) Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cukup layanan, dan penyesuaian factor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

b) Analisis Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana peristiwa daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

c) Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang digunakan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relative. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relative lebih efisien disbanding tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisensinya kurang dari 100%.Sebaiknya jika melebihi 100% maka mengidentifikasi terjadinya pemborosan anggaran.

Melihat kinerja Pendapatan dan Kinerja Belanja, maka dapat dinilai kinerja anggaran APBD secara umum.Jika semua kinerja tersebut menunjukkan pencapaian angka yang sudah ditargetkan, maka dikatakan kinerja anggaran APBD adalah baik,dan seterusnya.

C. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan. Beberapa studi empiris yang menjadi acuan penulisan skripsi ini antara lain.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Mohammad Adhim (2008)	Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitannya Dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten Sarolangun	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sarolangun dalam merealisasikan pendapatan baik PAD dan pajak daerah dari tahun 2001-2007 dapat dikatakan efektif dan efisien. Kabupaten Sarolangun masih tergantung pada pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan desentralisasi masih rendah
2	Eka Rosalina (2008)	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatra Barat dalam merealisasikan pendapatan pada tahun 2003-2006 dapat dikatakan efektif dan efisiensi, pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif
3	Chitra Ananda (2009)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009-2011	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah pandeglang dikatakan cukup, hanya secara garis besar, namun mempunyai kekurangan yaitu masih bergantung pada pemberian dari pemerintah pusat dan kurang maksimal pendapatan asli daerah

4	Puput Risky Pramita (2009)	Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kabumen Tahun 2009-2013	Deskriptif Kuantitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dilihat dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 104,46% 2. Rasio Efisiensi Keuangan Keuangan Daerah tergolong Efisien karena rata-rata besar rasio ini sebesar 99,82% 3. Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 80,97%
5	Nining Yunia Anarti (2010)	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	Kuantitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana anggaran pendapatan lebih kecil daripada realisasinya dengan varians sebesar Rp. 14.565.374.134,84 atau 2,50% . Pada pos belanja lebih kecil dari pada realitasnya dengan varians sebesar Rp.59.952.815.120,56 atau 9.57 % 2. Tingkat efisiensi APBD tahun 2007

				<p>Kabupaten Magetan menurut Pemerintah Daerah dimana selama periode penelitian tahun 2007 dengan tingkat efektivitas APBD tahun 2007 Kabupaten Magetan menurut pemerintah Daerah dimana selama periode penelitian tahun Anggaran 2007 dengan tingkat efektivitas sebesar 102.50% artinya sangat efektif</p>
6	Srigandi Julianda (2011)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Deskriptif	jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota kabupaten sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan kandungan teori data dan data yang ada
7	Mhd Ichwan Cahyadi (2015)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berada di Kriteria Sangat Kurang
8	Muhammad Rudianto (2015)	Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan keuangan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah	Kuantitatif	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kinerja Keuangan daerah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong kurang baik, rasio efektivitas keuangan

				daerah termasuk kategori efektif, rasio aktivitas keuangan daerah kurang baik, rasio pertumbuhan dikategorikan rendah
9	Christin Marciah Poyoh (2017)	Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon	Deskriptif Kuantitatif	Hasil Penelitian menunjukkan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon dalam mengelola pendapatannya dikatakan dikatakan belum baik hal ini dibuktikan dari varians pendapatan yang menunjukkan bahwa BKD belum mampu merealisasikan pendapatannya lebih dari yang dianggarkan.
10	Samuel Eddy Gunawan (2018)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang	Kuantitatif	kinerja pengelolaan pendapatan Pemkot Malang dapat dikatakan baik karena ditemukannya kondisi favourable variance pada sebagian besar pendapatan periode Tahun 2007 sampai dengan 2011

D. Kerangka Konsep

Konsep penelitian ini adalah bahwa anggaran sektor publik/pemerintah merupakan rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah yang dipresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan didanai dengan uang publik .

Anggaran sektor publik tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi merupakan akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang di sebarakan kepada

pemerintah. Kinerja pengelolaan anggaran didasarkan pola pencapai target anggaran, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran kinerja.

Untuk menunjukkan pengelolaan anggaran pendapatan maupun belanja pemerintah, diperlukan sistem informasi yang memadai untuk menilai seberapa baik pencapaian kinerja berdasarkan pada indikator pendapatan dan indikator belanja yang kemudian dievaluasi dengan maksud untuk lebih memperbaiki kinerja anggaran. yaitu untuk melihat kinerja anggaran pendapatan dan kinerja anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Soppeng kerangka konseptual penelitian yang dijadikan dasar pemikiran analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang berlangsung saat ini, atau memusatkan perhatian pada masalah aktual tanpa memberikan pendekatan khusus terhadap gejala, peristiwa tersebut. Gejala atau peristiwa ini yang akan di operasi yakni kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja khususnya pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Menurut Erlina (2007:64), "penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektiflain." Menurut Sugiono (2007:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada instansi pemerintah daerah yang berkomponen dalam pengelolaan keuangan daerah yang terletak di Kabupaten Soppeng. Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis mulai dari perintah awal, penyusunan proposal hingga hasil penelitian memakan waktu penelitian kurang lebih dua bulan dari bulan Juni S/D Agustus 2019.

C. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder berupa dokumen, laporan anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng periode 2014-2018.

D. Teknik pengumpulan data

1. Observasi adalah metode dasar dalam memperoleh data pada penelitian kualitatif.
2. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
3. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Soppeng di definisikan sebagai berikut :

Tabel 2 Definisi Operasional

No.	Variabel Penelitian	Definisi
1	Anggaran Pendapatan	Rencana keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
2	Anggaran Belanja Daerah	Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, pengawasan daerah

F. Teknis Analisis Data

Berdasarkan pada anggaran pendapatan dan anggaran belanja pemerintah daerah Kabupaten Soppeng masing masing dianalisis untuk mengetahui tingkat kinerja anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Soppeng yang dinilai sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Pendapatan

Dalam melakukan analisis pendapatan dapat dilakukan dalam bentuk rasio dengan menggunakan rumus :

a) Analisis Varians (Selisih) Pendapatan

b) Analisis Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Pertumbuhan PAD Tahun } t = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\%$$

c) Analisis Rasio Keuangan

1) Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Kemandirian Keuangan

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3) Derajat Kontribusi PAD

$$\text{Derajat Kontribusi PAD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Analisis Kinerja Belanja

a) Analisis Varians (Selisih Belanja)

b) Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan PAD Tahun } t = \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } t-1}{\text{Belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

c) Analisis Keserasian Belanja

1) Analisis Belanja Rutin dan Pembangunan terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

3) Analisis Belanja Langsung dan tidak Langsung terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sementara itu, rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Belanja Tidak Langsung

$$\text{terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

4) Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rasio yang di peroleh dari kinerja pendapatan dan kinerja belanja maka dilakukan penilaian untuk kepentingan evaluasi hasil pengukuran menjadi sebuah informasi yaitu berdasarkan kategori nilai kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi

Nomor	Nilai	Tingkat Desentralisasi
1	0,00 – 10,00	Sangat Kurang
2	10,01 – 20,00	Kurang
3	20,01 – 30,00	Sedang
4	30,01 – 40,00	Cukup
5	40,01 – 50,00	Baik
6	> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:7)

Tabel 4. Kategori Nilai Kinerja

Nomor	Nilai	Kinerja
1	> 90 – 100 %	Sangat Baik
2	> 80 – 90 %	Baik
3	> 60 – 80 %	Cukup
4	> 50 – 60 %	Kurang
5	≤ 50 %	Sangat Kurang

Sumber : PMK nomor 249 tahun 2011 tentang pengeluan dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Soppeng memiliki luas wilayah 1 500 km² yang terbagi ke dalam 8 wilayah kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Marioriwawo dengan luas 300 km² atau seperlima luas wilayah Kabupaten Soppeng. Kabupaten Soppeng berada pada ketinggian antara 5 - 1 500 meter di atas permukaan laut. Jarak ibu kota kecamatan Citta ke ibu kota Kabupaten Soppeng sejauh 35 km dan merupakan ibu kota kecamatan terjauh. Kabupaten Soppeng dialiri 5 sungai antara lain Sungai Langkemme, Soppeng, Lawo, Paddangeng dan Lajaroko. Sementara gunung yang ada di Soppeng antara lain Gunung Nene Conang, Sewo, Lapancu, Pulupulu dan Paowengeng. Gunung tertinggi yaitu Gunung Nene Conang yang memiliki ketinggian puncak 1 463 meter di atas permukaan laut.

Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Soppeng terdiri dari 49 Desa dan 21 Kelurahan. Satuan Lingkungan di bawah desa dan kelurahan terdapat sebanyak 125 Lingkungan, 43 Dusun, 445 RW dan 1191 RT. Anggota DPRD Kabupaten Soppeng ada sebanyak 30 orang yang terdiri dari 24 laki-laki dan 6 perempuan. Selama tahun 2017, ada sebanyak 36 produk hukum yang dihasilkan antara lain 8 Peraturan Daerah, 22 Keputusan DPRD dan 6 Keputusan Pimpinan DPRD. Ada sebanyak 1147 PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 529 laki-laki dan 618 perempuan. Selama tahun 2017, ada sebanyak 519 IMB yang dikeluarkan dengan rincian 511 rumah permanen dan 8 rumah panggung.

Secara Topografis luas daerah perbukitan Soppeng kurang lebih 800 km² dan berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Ibu kota Kabupaten Soppeng adalah kota Watansoppeng yang berada pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai. Wilayah perairan hanya sebagian dari Danau Tempe. Gunung-gunung yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng menurut ketinggiannya adalah sebagai berikut:

- Gunung Nene Conang 1.463 m
- Gunung Laposo 1000 m
- Gunung Sewo 860 m
- Gunung Lapancu 850 m
- Gunung Bulu Dua 800 m
- Gunung Paowengeng 760 m

Kabupaten Soppeng memiliki tempat-tempat wisata berupa permandian air panas alami yang bernama "LEJJA", permandian mata air "OMPO" dan permandian alam "CITTA". Lejja berjarak ± 40 Kilometer dari pusat kota, terletak di desa Batu-batu, Kecamatan Marioriawa.

Secara ekonomis PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Soppeng tahun 2017 sebesar 8 947 107 050 rupiah. PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 Kabupaten Soppeng tahun 2017 sebesar 6 012 107 710 rupiah. Distribusi persentase PDRB menunjukkan kategori yang memiliki peran paling besar menyumbang PDRB Kabupaten Soppeng. Tahun 2017, kategori yang memiliki distribusi persentase terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 30,60 persen. Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2017 sebesar 8,34 persen dimana kategori yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi yaitu kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,99 persen

Secara geografis Soppeng terletak pada depresiasi sungai Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan dengan luas daratan ± 700 km² serta berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m di atas permukaan laut. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Barru

Secara Sosial Pada tahun 2017, ada sebanyak 270 SD/MI, 69 SMP/MTS dan 31 SMA/SMK/MA di Kabupaten Soppeng yang tersebar di 8 kecamatan. Terdapat sebanyak 40 peserta program Kejar Paket A, 100 peserta program Kejar Paket B dan 160 peserta program Kejar Paket C. Angka Partisipasi Sekolah tahun 2017 kelompok umur 7-12 tahun sebesar 98,78 sedangkan kelompok 13-15 tahun sebesar 94,51 dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 77,91. Terdapat sebanyak 1 rumah sakit, 17 puskesmas, 44 puskesmas pembantu, 35 praktek dokter dan 327 posyandu. Tenaga kesehatan yang ada sebanyak 14 dokter umum, 14 dokter gigi, 100 bidan dan 143 perawat. Sebagai salah satu daerah otonom bertatus kabupaten di propinsi Sulawesi Selatan, kedudukan, fungsi dan peran Kabupaten Soppeng cukup penting dan strategis secara regional. Masing-masing daerah pada dasarnya memiliki pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

B. Gambaran Perekonomian dan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng

1. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Soppeng

Nilai PDRB Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 10,001 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sekitar 1,125 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 8,876 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 6,007 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 6,497 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Soppeng mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 8,15 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi oleh inflasi.

a. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2014- 2018) struktur perekonomian Soppeng didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Soppeng. Peranan

terbesar dalam pembentukan PDRB Soppeng pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 30,53 persen (angka ini bertambah dari 30,33 persen di tahun 2014). Selanjutnya, lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,90 persen (turun dari 12,92 persen di tahun 2014), dan disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,76 persen (naik dari 12,26 persen di tahun 2014). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,48 persen (naik dari 10,16 persen di tahun 2014). Berikut gambaran Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Soppeng :

Tabel 5. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014–2018

No	Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.33	28.41	30.28	30.77	30.53
2	Pertambangan dan Penggalian	3.91	4.19	4.51	4.33	4.33
3	Industri Pengolahan	10.16	10.65	10.42	10.55	10.48
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
6	Konstruksi	12.92	12.91	12.21	12.38	12.90
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.26	12.61	12.42	12.40	12.76
8	Transportasi dan Pergudangan	3.88	2.72	2.76	2.95	2.99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.54	1.52	1.44	1.45	1.47

10	Informasi dan Komunikasi	2.88	2.72	2.76	2.95	2.99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.44	3.43	3.50	3.33	3.24
12	Real Estat	5.44	3.43	3.50	3.33	3.24
13	Jasa Perusahaan	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.02	7.32	6.60	6.32	6.07
15	Jasa Pendidikan	4.51	4.51	4.36	4.27	4.18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.62	1.63	1.63	1.64	1.68
17	Jasa lainnya	0.67	0.71	0.71	0.73	0.74
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik 2014-2018

Keterangan :

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Di antara keempat lapangan usaha tersebut, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 6 persen, kecuali Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah kegagalan panen yang diakibatkan adanya puso dan banjir di beberapa titik wilayah di Kabupaten Soppeng. Sehingga, produksi hasil pertanian berkurang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Soppeng pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Soppeng atas dasar harga konstan 2010, mencapai 6,497 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 6,007 triliun rupiah di tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 8,15 persen. Pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya sebesar 8,29 persen. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah produksi di tahun 2018, tidak sebanyak peningkatan di tahun 2017. Melalui terselenggaranya Festival Internasional La Galigo, telah mendorong percepatan pertumbuhan pada beberapa sektor ekonomi. Adapun sektor yang terkena dampak terbesar adalah Jasa Lainnya, khususnya pada sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, pertumbuhannya mencapai 13,16 persen, atau 3,97 persen lebih cepat dibandingkan tahun 2017 dimana pertumbuhannya sebesar 9,19 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami

pertumbuhan sebesar 12,09 persen. Tingginya pertumbuhan ini juga diakibatkan adanya festival tersebut yang membuat jumlah tamu hotel meningkat dan juga omzet tempat makan meningkat.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Empat lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas sepuluh persen. Sembilan lapangan usaha memiliki pertumbuhan antara 6 hingga 10 persen. Sedangkan satu lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari 6 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas 10% antara lain: lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 13,16%, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,09%, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,08%, serta lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,07%. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan antara 6 hingga 10% antara lain : Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 9,96%; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,64%; lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,58%; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,48%; lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,32%; lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,16%; lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,94%; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 8,12%; serta lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6%. Sedangkan empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari

6 (enam)% adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,95%, lapangan usaha Real Estat sebesar 5,74%, Industri Pengolahan sebesar 5,70% dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,29%.

Sejak siberlakukan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut berkonsekuensi, masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejaterah, dan kompetatif.

Untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan, peran, fungsi, dan tanggung jawabannya. Pemerintah Kabupaten Soppeng memiliki beberapa sumber pendapatan pokok yaitu : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sebagai daerah yang berkembang ekonominya sangat didominasi sektor skunder dan primer, sumber pendapatan asli daerah sebagian besar diperoleh dari hasil Lain-lain hasil pendapatan daerah. Namun sumber penerimaan terbesar Kabupaten Soppeng masih berasal dari alokasi pusat (dana perimbangan / dana alokasi Umum).

Pemanfaatan sebagian besar dana perimbangan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng digunakan untuk pengembangan jaringan infrastruktur daerah terpadu, termasuk pemeliharannya. Dengan demikian keterpaduan tersebut yang dibangun benar-benar memperlancar arus barang dan jasa antar daerah sehinggah menciptakan kegiatan ekonomi sosial masyarakat Kabupaten Soppeng. Kegiatan ekonomi yang maju dan berkembang pada akhirnya bisa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Realisasi APBD Kabupaten Soppeng dalam waktu Lima Tahun Terakhir, sebagai berikut:

Tabel 6.
Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Soppeng
Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran Pendapatan	Ralisasi Pendapatan
2014	829.201.218.469,00	846.234.822.801,54
2015	1.040.140.112.247,00	1.029.160.126.344,91
2016	1.236.893.800.959,00	1.226.295.372.432,74
2017	1.131.991.996.848,00	1.155.718.382.299,00
2018	1.156.085.996.471,80	1.115.687.367.171,00

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng ,2019

C. Hasil Perhitungan dan Analisis Kinerja Pengelolaan APBD

1. Analisis Kinerja Pendapatan

Dengan menggunakan data APBD dan Realisasi APBD, dilakukan Analisis pendapatan dengan menggunakan cara analisis:

a. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan

Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan di anggarkan. Biasanya

yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu penggunaan laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

Tabel 7.
Perhitungan Varians Pendapatan Pemerintah
Daerah Kabupaten Soppeng 2014-2015

Tahun	Anggaran Pendapatan	Ralisasi Pendapatan	Varians	(%)
2014	829.201.218.469,00	846.234.822.801,54	17.033.604.332,54	2,1
2015	1.040.140.112.247,00	1.029.160.126.344,91	10.979.985.902,09	1,6
2016	1.236.893.800.959,00	1.226.295.372.432,74	10.589.428.526,26	0,8
2017	1.131.991.996.848,00	1.155.718.382.299,00	23.726.385.451,00	2,0
2018	1.156.085.996.471,80	1.115.687.367.171,00	40.398.629.300,80	3,6

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng (Olahan data, 2019)

Berdasarkan tabel 6 perhitungan analisis varians tahun 2014 melebihi anggaran pendapatan dengan varians sebesar 17,033,604,332.54 dari anggaran pendapatan 829,201,218,469.00 dan realisasi pendapatan sebesar 846,234,822,801.54 dengan persentase 2,1%, kemudian pada tahun 2015 anggaran pendapatan 1,040,140,112,247.00 dan realisasi pendapatan sebesar 1,029,160,126,344.91 dengan varians 10,979,985,902,09 dan persentase sebesar 1,6%, pada tahun 2016 anggaran pendapatan sebesar 1,236,893,800,959.00 dan realisasi pendapatan 1,226,295,372,432.74 dengan varians 10,589,428,526.26 dan persentase 0,8%, di tahun 2017 anggaran pendapatan 1,131,991,996,848.00 dan realisasi pendapatan 1,155,718,382,299.00 dengan varians 23,726,385,451.00 dengan persentase sebesar 2% dan melebihi anggaran pendapatan, dan pada tahun 2018 anggaran pendapatan sebesar 1,156,085,996,471,80 dan realisasi pendapatan sebesar 1,115,687,367,171.00 dengan varians 40,398,629,300.80 dan persentase 3,6%. Secara umum kinerja pendapatan Kabupaten Soppeng pada

tahun 2014-2018 dapat dikatakan sangat baik hal ini ditunjukkan dari realisasi pendapatan hampir semua melampaui target anggaran.

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 8.
Pertumbuhan Pendapatan
Tahun 2014-2018

Tahun	PAD	Pertumbuhan (%)	Total Pendapatan	Pertumbuhan (%)
2014	50,400,012,080.00	-	829,201,218,469.00	-
2015	57,986,825,109.00	15	1,040,140,112,247.00	25,4
2016	83,286,049,912.00	43,6	1,236,893,800,959,00	18,9
2017	115,309,170,743.00	38,4	1,131,991,996,848.00	(8,4)
2018	103,514,904,474,00	(10,2)	1,115,687,367,171.00	(1,4)
	Rata-rata	26,8		13,5

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng (Olahan data, 2019)

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa kinerja anggaran dari analisis pertumbuhan pendapatan dan PAD Kabupaten Soppeng tahun 2015 dengan pertumbuhan pendapatan mencapai 15% dengan PAD sebesar 57,986,825,109.00 dari PAD 2014 yaitu sebesar 50,400,012,080.00, kemudian tahun 2016 PAD naik sebesar 83,286,049,912.00 dan pertumbuhan pendapatannya mencapai 43,6% dari tahun sebelumnya, di tahun 2017 dengan PAD sebesar 115,309,170,743.00 pertumbuhan pendapatannya yaitu sebesar 38,4% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar 10,2%. Kinerja anggaran pertumbuhan pendapatan dan PAD Kabupaten Soppeng tahun 2014-2018 cukup baik. hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD yang positif yaitu sebesar 26,8% meskipun pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2018.

Sementara itu pertumbuhan pendapatan di tahun 2015 yaitu sebesar 1,040,140,112,247.00 dengan pertumbuhan sebesar 25,4% dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2016 total pendapatan sebesar 1,236,839,800,959.00 pertumbuhan pendapatan positif yaitu 18,9% dari tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2017-2018 pertumbuhannya negatif yaitu 8,4%, dan 1,4%, tahun 2017 yang hanya total pendapatannya hanya sebesar 1,131,991,996,848.00 dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2018 total pendapatan 1,115,687,367,171.00 ini menunjukkan Pertumbuhan pendapatan cenderung fluktuatif. Dari tahun 2014-2018 kinerja pendapatan pemerintah Kabupaten Soppeng cukup baik hal ini di tunjukkan dengan hasil positif rata-rata yaitu 13,5%.

c. Analisis Rasio Keuangan

1. Derajat Desentralisasi

Tabel 9.
Derajat Desentralisasi
Tahun 2014-2018

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)
2014	50.400.012.080,00	829.201.218.469,00	6
2015	57.986.825.109,00	1.040.140.112.247,00	5,5
2016	83.286.049.912,00	1.236.893.800.959,00	6,7
2017	115.309.170.743,00	1.131.991.996.848,00	13,7
2018	103.514.904.474,00	1.115.687.367.171,00	9,2
Rata-rata			8,2

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng (Olahan data, 2019)

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi tahun 2014 dengan persentase desentralisasi hanya sebesar 6% dari PAD sebesar 50,400,012,080.00 dan Pendapatan Daerah sebesar 829,201,218,469.00, kemudian pada tahun 2015 PAD naik sebesar 57,986,825,109.00 dengan

Pendapatan Daerah sebesar 1,040,140,112,247.00 dengan rasio 5,5%, di tahun 2016 PAD naik sebesar 83,286,049,912.00 dengan Pendapatan Daerah sebesar 1,236,893,800,959,00 dengan persentase 6,7%, tahun 2017 PAD sebesar 115,309,170,743.00 dengan pendapatan daerah sebesar 1,131,991,996,848.00 dengan persentase sebesar 13,7%, dan pada tahun 2018 PADnya mengalami penurunan yaitu dari tahun sebelumnya dan hanya sebesar 103,541,904,474.00 dengan pendapatan daerah 1,115,687,367,171.00 dengan persentasi 9,2%. Dari perhitungan tersebut bahwa derajat deaentralisasi Kabupaten Soppeng dapat dikatakan sangat rendah. Rata –rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2014-2018 yaitu 8,2%. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Soppeng untuk menggali dan mengelola pendapatan masih sangat kurang. Untuk itu kedepannya harus lebih berupaya untuk meningkatkan PAD nya baik dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan potensi-potensi pendapatan yang sudah ada.

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 10.
Kemandirian Keuangan
Tahun 2014-2018

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi+ Pinjaman	Rasio Kemandirian (%)
2014	50.400.012.080,00	635.144.135.944,00	7,9
2015	57.986.825.109,00	760.391.611.934,00	7,6,
2016	83.286.049.912,00	1.044.597.746.452,00	7,9
2017	115.309.170.743,00	927.192.099.579,00	16,7
2018	103.514.904.474,00	893.413.851.89,00	11,5
Rata-rata			10,3

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng (Olahan data, 2019)

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan tahun 2014 dengan rasio kemandirian mencapai 7,9% dari PAD sebesar 50,400,012,080.00 dan bantuan pemerintah sebesar 635,144,135,944.00 ,kemudian di tahun 2015 dengan PADnya naik sebesar 57,986,825,109.00 dengan bantuan pemerintah 760,391,611,934.00 dengan persentase rasio mencapai 7,6%, tahun 2016 dengan PAD sebesar 83,286,049,912.00 dan bantuan pemerintah sebesar 1,044,597,746,452.00 dengan persentasi rasio 7,9%, di tahun 2017 dengan PAD sebesar 115,309,170,743.00 dan bantuan pemerintah 927,099,579.00 dengan persentasi sebesar 16,7%. Dan pada tahun 2018 PADnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu PAD hanya 103,514,904,474.00 dan bantuan pemerintah 893,413,851,899.00 dengan persentasi rasio mencapai 11,5%. Dari perhitungan kemandirian keuangan Kabupaten Soppeng tahun 2014-2018 masih rendah dan mempunyai kecenderungan menurun. Rata-rata rasio kemandirian yaitu hanya 10,3%. Ini berarti Kabupaten Soppeng masih ketergantungan atas sumber dana baik dari pemerintah pusa/propinsi maupun pinjaman.

3. Derajat Kontribusi BUMD

Tabel 11.
Derajat Kontribusi BUMD
Tahun 2014-2018

Tahun	Bagian laba BUMD	Penerimaan PAD	Derajat Kontribusi BUMD (%)
2014	6.341.166.186,00	50.400.012.080,00	12,5
2015	8.452.817.334,00	57.986.825.109,00	14,5
2016	13.050.651.239,00	83.286.049.912,00	15,6
2017	13.000.000.000,00	115.309.170.743,00	11,2
2018	14.000.000.000,00	103.514.904.474,00	13,5
Rata-rata			13,4

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng (Olahan data, 2019)

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa derajat kontribusi BUMD tahun 2014 dengan rasio kontribusi mencapai 12,5% dari penerimaan PAD sebesar 50,400,012,080.00 dan penerimaan laba BUMD sebesar 6,341,166,186.00, kemudian pada tahun 2015 PAD sebesar 57,986,825,109.00 dan penerimaan laba BUMD 57,986,825,109.00 dengan rasio persentasi sebesar 14,5%, pada tahun 2016 dengan PAD 13,050,651,239.00 dan penerimaan laba BUMD sebesar 83,286,049,912.00 dengan rasio persentase 15,6%, kemudian pada tahun 2017 dengan PAD 13,000,000,000.00 dan penerimaan laba BUMD sebesar 115,309,170,743.00 dengan persentase 11,2%, dan pada tahun 2018 PAD sebesar 14,000,000,000.00 dan penerimaan laba BUMD sebesar 103,514,904,474.00 dengan persentasi rasio yaitu 13,5%. Menunjukkan bahwa Usaha daerah mampu memberikan kontribusi bagi PAD Kabupaten Soppeng hanya sebesar 11%. Hal ini menggambarkan dari tahun 2014-2018 Usaha daerah Kontribusi BUMD masih sangat kecil. Untuk itu diharapkan kedepannya BUMD dapat lebih berusaha untuk memberikan kontribusi lebih besar lagi PAD sehingga dapat lebih meningkat.

2. Analisis Kinerja Belanja

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians memberikan informasi tentang atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran daerah dapat dinilai baik belanjanya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaiknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang di anggarkan maka hal itu mengidentifikasi adanya keinerja belanja yang kurang baik.

Tabel 12.
Perhitungan Varians Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja	Varians	(%)
2014	887.152.936.598,00	330.124.996.858,00	557.027.939.740,00	16,8
2015	1.096.868.377.776,00	984.021.829.267,35	112.486.548.508,65	9,3
2016	1.320.871.298.370,00	1.200.412.475.086,30	120.458.832.283.70	10
2017	1.234.881.325.604,00	1.147.130.284.653,00	87.751.040.951,00	59,6
2018	1.221.166.254.699,82	1.152.398.351.010,10	68.767.903.689,52	45,1

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng (Olahan data, 2019)

Berdasarkan tabel 12 perhitungan analisis varians tahun 2014 dengan varians sebesar 557,027,939,740.00 dari total belanja sebesar 887,152,936,598.00 dengan realisasi sebesar 330,124,996,858.00 dengan persentase 16,3%, kemudian pada tahun 2015 total belanja meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,096,868,377,776.00 dan realisasi belanja 984,021,829,267.35 dengan varians 112,486,548,508.65 dan persentase 9,3%, di tahun 2016 total belanja 1,320,871,298,370.00 dan realisasi sebesar 1,200,412,475,086.30 dengan varians sebesar 120,458,832,283.70 dan persentase sebesar 10%, di tahun 2017 total belanja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 1,234,881,325,604.00 dan realisasi belanja sebesar 1,147,130,284,653.00 dengan varians 87,751,040,951.00 persentase sebesar 59,6%, dan pada tahun 2018 total belanja 1,221,166,254,699.82 dan realisasi belanja sebesar 1,152,398,351,010.10 dengan varians 68,767,903,689.52 dan persentase sebesar 45,1%. Ini menunjukkan bahwa total belanja dan realisasi belanja cenderung mengalami perubahan. Secara umum Kinerja pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2014-2018 dapat dikatakan baik, meskipun realisasi anggaran tidak ada yang melebihi yang dianggarkan akan tetapi anggaran belanja hampir semua terealisasi.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Tabel 13.
Pertumbuhan Belanja
Tahun 2014-2018

Tahun	Belanja Daerah	Tingkat Pertumbuhan (%)
2014	887.152.936.598,00	-
2015	1.096.868.377.776,00	23,6
2016	1.320.871.298.370,00	20,4
2017	1.234.881.325.604,00	(6 ,5)
2018	1.221.166.254.699,82	(1,1)
	Rata-rata	12,9

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng (Olahan data, 2019)

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja pada tahun 2015 dengan rasio tingkat pertumbuhan mencapai 23,6% dari belanja daerah sebesar 1,096,868,377,776.00 dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2016 belanja daerah sebesar 1,320,871,298,370.00 dengan persentase tingkat pertumbuhan yaitu 20,4%, di tahun 2017 belanja daerah mengalami penurunan dengan persentase rasio negatif yaitu 6,5% dari belanja daerah sebesar 1,234,881,325,604.00, dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan pertumbuhan dengan persentase yaitu 1,1%. Pertumbuhan belanja Kabupaten Soppeng 2015-2018 menunjukkan pertumbuhan positif yaitu rata-ratanya 12,9% meskipun di tahun 2017 dan 2018 mengalami pertumbuhan negatif, Kecenderungan pertumbuhan belanja Kabupaten Soppeng fluktuatif terlihat dari tahun 2015-2018 pertumbuhan berturut-turut yaitu sebesar 23,6%, 20,4%, 6,5%, 1,1%.

c. Analisis Keserasian Belanja

1. Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja

Tabel 14.
Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan
Tahun 2014

Komponen Belanja		(%)
Belanja Rutin terhadap Belanja (Total Belanja Rutin / Total Belanja Daerah) x 100%	478.161.903.202,00	53,8
	887.152.936.598,00	
Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja (Total Belanja Pembangunan / Total Belanja Daerah) x 100%	174.150.369.832,00	19,6
	887.152.936.598,00	

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng (Olahan data, 2019)

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan bahwa untuk tahun 2014 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga persentase belanja pembangunan terhadap total belanja masih relatif kecil yaitu sebesar 19,6% di bandingkan dengan persentase belanja rutin yang sebesar 53,8%.

2. Rasio Belanja Operasi terhadap APBD dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Tabel 15.
Belanja Operasi dan Belanja Modal
Tahun 2015-2017

Tahun	Belanja Operasi terhadap Total Belanja (Total Belanja Operasi / Total Belanja) x100 %	Belanja Modal terhadap Total Belanja (Total Belanja Modal / Total Belanja) x 100 %	(%)	
	2015	173.180.677.780,00	282.999.782.111,00	15,7
1.096.868.377.776,00		1.096.868.377.776,00		
2016	208.611.673.369,00	415.662.236.704,00	15,7	31,4
	1.320.871.298.370,00	1.320.871.298.370,00		
2017	297.289.312.266,00	307.289.625.861,00	24	24
	1.234.881.325.604,00	1.234.881.325.604,00		
Rata-rata			18,4	27

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng (Olahan data, 2019)

Dari tabel perhitungan tersebut terlihat bahwa pada tahun 2015-2017 sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja modal dibandingkan belanja operasi sehingga persentase belanja operasi relatif kecil dari persentase belanja modal. Untuk belanja modal yaitu sebesar 27% sedangkan untuk belanja operasi yaitu sebesar 18,4%. Ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk menyediakan/pengadaan sarana dan prasarana yang manfaatnya melebihi satu tahun yang akan menambah asset atau kekayaanya daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang disesuaikan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Tabel 16.

Persentase Komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2018

Komponen Belanja		(%)
Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja (Total Belanja Langsung / Total Belanja Daerah) x 100%	588.769.081.570,00	48,2
	1.221.166.254.699,82	
Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja (Total Belanja Tidak langsung / Total Belanja Daerah) x 100%	632.397.173.129,82	51,7
	1.221.166.254.699,82	

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng (Olahan data, 2019)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tahun 2018 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung sehingga persentase belanja langsung relatif kecil dibandingkan persentase belanja tidak langsung. Persentase untuk belanja langsung yaitu 48,2% sedangkan persentase belanja tidak langsung yaitu sebesar 51,7%.

4. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Tabel 17.

Efisiensi Belanja Daerah
Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Beanja	Rasio Efisiensi (%)
2014	887,152,936,598.00	330,124,996,858.00	37,2
2015	1,096,868,377,776.00	984,021,829,267,35	89,7
2016	1,320,871,298,370.00	1,200,412,475,086.30	90,8
2017	1,234,881,325,640.00	1,147,130,284,653.00	92,8
2018	1,221,166,254,699.82	1,152,398,351,010.10	94,3
Rata-rata			80,9

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng (Olahan data, 2019)

Dalam tabel 16 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 persentasi sebesar 37,2% ini menandakan bahwa kinerjanya sangat kurang. Kemudian tahun 2015 baik dengan persentasi 89,7%. Tahun 2016 sangat baik dengan persentasi sebesar 90,8%. Tahun 2017 dengan persentasi sebesar 92,8% dapat dikatakan sangat baik. dan pada tahun 2018 sangat baik dengan persentase sebesar 94,3%. Dalam kurun waktu 2014-2018 terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan efisiensi belanja yang di buktikan dengan rasio efisiensi dengan persentasi rata-rata 80,9%. Ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng Baik.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis varians pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2014-2018 realisasi pendapatan hampir semua melampaui target anggaran. Analisis pertumbuhan pendapatan tahun 2014-2018 di tunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD dan pendapatan positif yaitu sebesar 26,8% dan 13,5%. Persentase keuangan menunjukkan bahwa Dari perhitungan derajat desentralisasi tahun 2014-2018 masih sangat rendah yaitu rata - rata 8,2%. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Soppeng untuk menggali dan mengelola pendapatan masih sangat kurang. Untuk itu kedepannya harus lebih berupaya untuk meningkatkan PAD nya baik dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan potensi-potensi pendapatan yang sudah ada.

Dari perhitungan kemandirian keungan Kabupaten Soppeng tahun 2014-2018 masih rendah dan mempunyai kecenderungan menurun. Rata-rata rasio kemandirian yaitu hanya 10,3%. Ini berarti Kabupaten Soppeng masih ketergantungan atas sumber dana baik dari pemerintah pusat/propinsi maupun pinjaman. Dari perhitungan derajat kontribusi BUMD menunjukkan bahwa Usaha daerah mampu memberikan kontribusi bagi PAD Kabupaten Soppeng hanya sebesar 11%. Hal ini menggambarkan dari tahun 2014-2018 Usaha daerah Kontribusi BUMD masih sangat kecil. Untuk itu diharapkan kedepannya BUMD dapat lebih berusaha untuk memberikan kontribusi lebih besar lagi PAD sehingga dapat lebih meningkat.

Varians belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2014-2018 dapat dikatakan baik, meskipun realisasi anggaran tidak ada yang melebihi yang dianggarkan akan tetapi anggaran belanja hampir semua terealisasi. Dari perhitungan pertumbuhan belanja Kabupaten Soppeng 2015-2018 menunjukkan pertumbuhan positif yaitu rata-ratanya 12,9% meskipun di tahun 2017 dan 2018 mengalami pertumbuhan negatif, Kecenderungan pertumbuhan belanja Kabupaten Soppeng fluktuatif terlihat dari tahun 2015-2018 pertumbuhan berturut-turut yaitu sebesar 23,6%, 20,4%, 6,5%, 1,1%.

Perhitungan keserasian belanja dari belanja rutin dan belanja pembangunan tahun 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang

dimiliki pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga persentase belanja pembangunan terhadap total belanja masih relatif kecil yaitu sebesar 19,6% di bandingkan dengan persentase belanja rutin yang sebesar 53,8%.

Dari perhitungan belanja operasi dan belanja modal pada tahun 2015-2017 sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja modal dibandingkan belanja operasi sehingga persentase belanja operasi relatif kecil dari persentase belanja modal. Untuk belanja modal yaitu sebesar 27% sedangkan untuk belanja operasi yaitu sebesar 18,4%. Ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana yang manfaatnya melebihi satu tahun yang akan menambah asset atau kekayaannya daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang disesuaikan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun 2018 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung sehingga persentase belanja langsung relatif kecil dibandingkan persentase belanja tidak langsung. Persentase untuk belanja langsung yaitu 48,2% sedangkan persentase belanja tidak langsung yaitu sebesar 51,7%. Dari perhitungan efisiensi belanja daerah tahun 2014-2018 terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan efisiensi belanja yang di buktikan dengan rasio efisiensi dengan persentasi rata-rata 80,9%. Ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng Baik . Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Samuel Eddy Gunawan (2018), dengan kinerja pengelolaan pendapatan Pemerintah Kota Malang dapat dikatakan baik karena ditemukan

kondisi favourable variance pada sebagian besar pendapatan periode tahun 2007 sampai dengan 2011.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Soppeng baik. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Soppeng masih bergantung pada pemerintah pusat dikarenakan Pendapatan Asli Daerahnya masih kecil.

B. Saran

Berdasarkan hasil ini, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi Bupati Kabupaten Soppeng harus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi-potensi baru dan perkembangan potensi daerah.
2. Bagi DPRD Kabupaten Soppeng diharapkan bisa mengambil pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian agar analisis terhadap kinerja pemerintah dapat mendapatkan gambaran kinerja pemerintah yang jelas. Peneliti selanjutnya juga disarankan menambah rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi.
- Adhim, Mohammad. 2008. *Analisis Kinerja Anggaran Perintah dan Kaitannya dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten Sololangan*. (Thesis S2). Universitas Negeri Jambi.
- Ananda, Chitra. 2009. *Analisis Kinerja Pengelolaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009-2011*. Fakultas Ekonomi-Universitas Gunadarma.
- Artanti, Nining Yunia. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)*. Univesitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Cahyadi, MhdIchwan. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*
- Departemen Akuntansi ,2004. *Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Medan. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
- Erlina, Sri Mulyadi. 2007. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. USU Perss. Medan.
- Gunawan, Samuel Eddy. 2018. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perintah Kota Malng*.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Julianda, Sringandi. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sector Publik*. UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salembah Empat.
- Poyoh, Christin Marciah. 2017. *Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tohon*. Fakultas Ekonomi-Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Pramita, Puput Risky. 2009. *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kabumen*. Fakultas Ekonomi-Universitas Negeri Yogyakarta.

- Patilima , Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press
- Rosalina, Eka. 2008. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat*. (Thesis S2). Universitas Gadjah Mada.
- Rudiyanto, Muhammad. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan keuangan*. Universitas Diponogoro.
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan Sembilan. CV Alfabeta Bandung.
- Yuwono.S., I.T. Agus, dan Hariyandi. 2005. *Pengangguran Sektor Publik. Pedoman Praktis. Penyusunan. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia Publising. Malang.
- Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dearah*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara dan Interpretasinya*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Perintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007*
- PMK Nomor 249 Tahun 2011 tentang *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*

RIWAYAT HIDUP



ILHAM, lahir di Macanre tanggal 09 Maret 1997, anak ketiga dari empat bersaudara. Ayah kandung bernama Lancong dan Ibu kandung bernama Nadira. Tahun 2003 penulis memasuki Pendidikan Dasar di SDN 105 Sumpang Ale' dan tamat pada tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan sekolah pada SMP Negeri 1 Lilirilau' Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Liliriaja pada tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Strata Satu (S1), dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2019.

